

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ahmadi Miru dan Sutarnnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen: Cetakan kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: MedPress, 2008.
- Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2014.
- Haris Munandar dan Puji A.L., *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: PT Erlangga, 2008.

- Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Koentjoro Poerbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1978.
- Mohammad Ihsan, *Kebijakan Publik: Dalam Perspektif Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Arskal Salim GP, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logas, 2010.
- Noor Fuad, *Dasar-dasar Keuangan Publik*, Jakarta: BPPK Departemen Keuangan, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2011.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Edisi Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Salim H. S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Suharto Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

B. Jurnal :

Andi M. Iqbal, “*Analisis Kebijakan Pengenaan Pajak Atas Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Minyak Solar*”, Volume 1 Nomor 1, Juni 2018.

Idup Suhady, “*Kepemerintahan yang Baik: Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*”, Jakarta, September 2009.

Jazim Hamidi, “*Makalah External Review atas Penjelasan Hukum AUPB*”, Jakarta, November 2015.

Madjedi Hasan, “*Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*”, Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Faculty of Law University of Indonesia, Agustus 2010.

Nota Keuangan APBN 2013.

Nugroho Hanan, “*Pengembangan Industri Hilir Gas Bumi Indonesia: Tantangan dan Gagasan*”, Perencanaan Pembangunan Nomor IX/04, September 2004.

Rudi Handoko dan Pandu Patriadi, “*Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM, Kajian Ekonomi dan Keuangan*”, Volume 9 Nomor 4, Desember 2005.

Safri Nugraha, “*BPHN: Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*”, Jakarta, Desember 2007.

Satjipto Raharjo, “*Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*”, Jurnal Masalah Hukum, September 1999.

Tata Tertib DPR-RI, Bab VII.

C. Rujukan Elektronik :

<http://www.esdm.go.id/datasektoriesdm.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.

Ikhtisar Pelaksanaan Repelita I, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7070/, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

Tridoyo Kusumastanto, Arief Budi Purwanto, Luky Adrianto. Good Governance Dalam Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral, www.esk.ipb.ac.id/index.php/download/category/2-publikasi-dosen?download=5%3Agood-governance-dalam-pengelolaan-energi-dan-sumberdaya-mineral, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

<http://www.bphmigas.go.id/berita-bbm>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

<http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=quo-vadis-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

<http://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungankonsumen>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019